



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

2

0

2

3

ESELON I

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 28 Juli 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Kurniawan
NIP 196406191988111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, 28 Juli 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Kurniawan
NIP 196406191988111001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp595.625.507,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.078.539.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp99.535.790.576,00 atau mencapai 3% dari alokasi anggaran sebesar Rp304.694.164.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.449.834.786.672,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.341.980.081,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.443.195.544.733,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.297.261.858,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.010.172.451,00 dan Rp1.435.824.614.221,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp147.309.507,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp117.966.345.901,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp117.819.036.394,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp547.393.767,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp117.271.642.627,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang

berakhir per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.454.096.342.965,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp117.271.642.627,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp59.748.814,00 dan transaksi antar entitas senilai Rp98.940.165.069,00 kenaikan/penurunan ekuitas (Rp18.271.728.744,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp1.435.824.614.221,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		%	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.078.539.000	595.625.507	55	2.308.925.770
JUMLAH PENDAPATAN		1.078.539.000	595.625.507	55	2.308.925.770
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	33.529.000.000	18.823.311.557	56	15.906.062.631
Belanja Barang	B.4	211.386.976.000	76.708.333.450	36	66.429.409.221
Belanja Modal	B.5	59.778.188.000	4.004.145.569	7	5.860.725.194
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		304.694.164.000	99.535.790.576	33	88.196.197.046

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM NERACA PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	984.988.851	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.997.034.992	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.4	(186.800)	-
Piutang PNPB	C.5	221.681	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	221.681	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	359.921.357	476.702.771
Jumlah Aset Lancar		4.341.980.081	476.702.771
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.16	120.126.127.883	116.512.418.038
Gedung dan Bangunan	C.17	353.240.892.754	353.165.757.229
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.18	12.359.677.154	12.359.677.154
Aset Tetap Lainnya	C.19	3.099.480.647	3.074.558.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.20	374.194.494	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(135.004.896.199)	(122.664.142.634)
Aset Tetap yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Tetap		1.443.195.544.733	1.451.448.336.784
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.22	3.157.897.433	3.143.147.433
Aset Lain-Lain	C.23	5.251.742.286	5.188.629.286
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(6.112.377.861)	(5.710.237.777)
Jumlah Aset Lainnya		2.297.261.858	2.621.538.942
JUMLAH ASET		1.449.834.786.672	1.454.546.578.497
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	984.988.851	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.26	9.354.660.417	349.715.146
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	3.667.148.183	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	-	100.520.386
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	3.375.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.010.172.451	450.235.532
JUMLAH KEWAJIBAN		14.010.172.451	450.235.532
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	1.435.824.614.221	1.454.096.342.965
JUMLAH EKUITAS		1.435.824.614.221	1.454.096.342.965
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.449.834.786.672	1.454.546.578.497

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	147.309.507	432.573.628
JUMLAH PENDAPATAN		147.309.507	432.573.628
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	20.919.119.256	20.000.962.387
Beban Persediaan	D.3	496.959.400	1.056.817.929
Beban Barang dan Jasa	D.4	55.810.856.019	54.759.386.831
Beban Pemeliharaan	D.5	5.237.068.109	5.636.040.169
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21.837.298.929	6.965.346.867
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	35.252.500
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	13.665.044.188	12.379.700.139
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		117.966.345.901	100.833.506.822
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(117.819.036.394)	(100.400.933.194)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		93.420.164	157.669.133
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		453.973.603	1.793.245.691
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		453.973.603	971.841.383
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		547.393.767	1.950.914.824
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(117.271.642.627)	(98.450.018.370)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(117.271.642.627)	(98.450.018.370)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.454.096.342.965	1.444.031.040.202
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(117.271.642.627)	(98.450.018.370)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		59.748.814	(1.510.719.466)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	(1.924.000)
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	59.748.814	(1.508.795.466)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	98.940.165.069	85.887.271.276
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(18.271.728.744)	(14.073.466.560)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.435.824.614.221	1.429.957.573.642

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian

Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.078.539.000	1.078.539.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	1.078.539.000	1.078.539.000
Belanja		
Belanja Pegawai	33.116.929.000	33.529.000.000
Belanja Barang	169.889.197.000	211.386.976.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	52.470.076.000	59.778.188.000
Jumlah Belanja	255.476.202.000	304.694.164.000

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp595.625.507,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp595.625.507,00 atau mencapai 55% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.078.539.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	91.039.000	137.457.327	150,99
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	987.500.000	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	4.194.577	0
Pendapatan Lain-lain	-	453.973.603	0
Jumlah	1.078.539.000	595.625.507	55,23

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 74,20% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya serta pendapatan lain-lain atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	137.457.327	161.248.419	(14,75)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	4.194.577	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	-	353.043.950	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	453.973.603	1.794.633.401	(74,70)
Jumlah	595.625.507	2.308.925.770	-74,20

Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp137.457.327,00.
 - Terdapat realisasi akun (425129) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp94.897.664,00 yaitu berupa:
 - Satker BPSDM sebesar Rp93.577.664,00,00 berupa lelang 1 paket scrab, 4 sepeda motor, 1 paket bekas bongkaran rumah dinas.

- b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp1.320.000,00 atas Hasil penjualan / lelang BMN.
- Terdapat realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp42.559.663,00 yaitu berupa:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp42.246.377,00 atas sewa Auditorium, sewa Kamar Flat, sewa Kamar Asrama, sewa Ruang Kantin.
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp313.286,00 Pendapatan atas sewa rumah dinas untuk Direktur Politeknik Imigrasi.
- 2. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan (4257) berupa Realisasi akun (425765) Pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp4.194.577,00 yang merupakan penutupan rekening penampungan Tunjangan Ikatan Dinas Taruna.
- 3. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp453.973.603,00 terdiri dari :
 - Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp743.276,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp556.320,00 berupa pengembalian tunjangan umum karena pegawai tersebut menduduki jabatan fungsional a.n. Adnan, dan pengembalian pembulatan gaji pegawai oleh beberapa pegawai karena efek dari proses pembayaran kekurangan gaji.
 - b. Satker Poltekip sebesar Rp152,00 berupa pembulatan gaji.
 - c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp186.804,00 berupa penerimaan kelebihan pembayaran gaji a.n Wahyuni Sasto dan pembulatan gaji a.n Ju Lotje Olga.
 - Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp384.628.500,00 pada satker Politeknik Imigrasi yang merupakan sisa kontrak tahun lalu.
 - Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp68.601.827,00 yang terdiri dari :

- a. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp24.301.352,00 berupa setoran temuan BPK.
- b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp14.861.791,34 atas pembangunan Gedung Olahraga dan Jalan Lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hasil temuan audit BPK atas pembangunan gedung olahraga dan jalan lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp29.438.683,31.

B.2. BELANJA

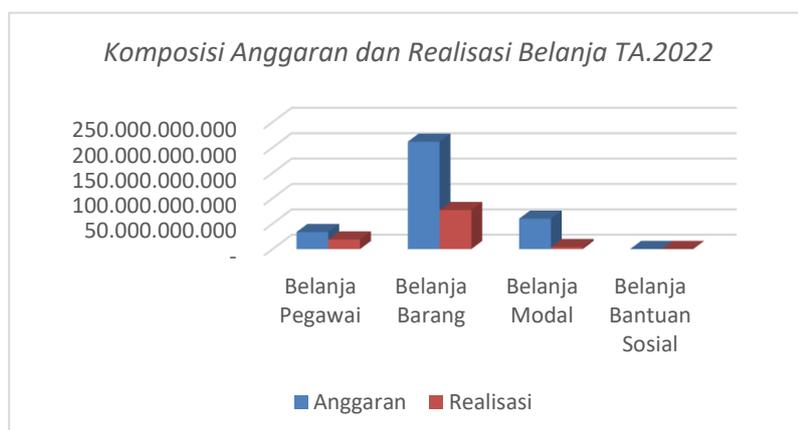
Realisasi Belanja Rp99.535.790.576,00

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp99.535.790.576,00 atau 33% dari anggaran belanja sebesar Rp2304.694.164.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	TA 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	33.529.000.000	18.824.794.928	56,14
Belanja Barang	211.386.976.000	76.711.333.450	36,29
Belanja Modal	59.778.188.000	4.004.145.569	6,70
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	304.694.164.000	99.540.273.947	32,67
Pengembalian Belanja		(4.483.371)	-
Total Belanja	304.694.164.000	99.535.790.576	32,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,86%.

Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	18.823.311.557	15.906.062.631	18,34
Belanja Barang	76.708.333.450	66.429.409.221	15,47
Belanja Modal	4.004.145.569	5.860.725.194	(31,68)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	99.535.790.576	88.196.197.046	12,86

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp18.823.311.557,
00

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.823.311.557,00 dan Rp15.906.062.631,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester I Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,34% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18.342.868.928	15.609.781.065	17,51
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	481.926.000	296.284.000,00	62,66
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	18.824.794.928	15.906.065.065	18,35
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.483.371)	(2.434)	60.843,76
Jumlah Belanja	18.823.311.557	15.906.062.631	18,34

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 30 Juni 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20.097.492.000	12.886.400.240	-	12.886.400.240	64,12
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	408.000	218.182	3.329	214.853	53,48
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.568.622.000	797.041.570	-	797.041.570	50,81
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	355.733.000	213.392.740	-	213.392.740	59,99
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.014.150.000	325.210.000	-	325.210.000	32,07
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.729.803.000	1.544.200.000	-	1.544.200.000	89,27
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	149.237.000	106.597.456	-	106.597.456	71,43
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.224.886.000	655.183.740	-	655.183.740	53,49
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.996.817.000	1.488.830.000	-	1.488.830.000	29,80
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	799.135.000	325.795.000	1.480.042	324.314.958	40,77
512211	Belanja Uang Lembur	1.592.717.000	481.926.000	-	481.926.000	30,26
		33.529.000.000	18.824.794.928	1.483.371	18.823.311.557	56,14

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 Juni TA 2023 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp1.483.371,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM sebesar Rp1.405,00 atas pembulatan gaji PNS a.n Budiono, Dwi Prasetyo, Sugiman.
- Satker Poltekip sebesar Rp1.480.042,00 atas pengembalian tunjangan umum PNS.
- Satker Jawa Tengah sebesar Rp74,00 atas pembulatan gaji pokok PNS.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp76.708.333.450,
00

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp76.708.333.450,00 dan Rp166.429.409.221,00.

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,47% dari Semester I TA 2022. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan anggaran Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8.075.219.330	8.606.292.315	(6,17)
Belanja Barang Non Operasional	30.514.376.189	26.439.167.254	15,41
Belanja Persediaan	369.713.475	631.053.123	(41,41)
Belanja Jasa	12.690.252.543	18.520.210.548	(31,48)
Belanja Pemeliharaan	5.093.941.984	5.482.081.325	(7,08)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.967.829.929	6.755.569.656	195,58
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	76.711.333.450	66.434.374.221	15,47
Pengembalian Belanja	(3.000.000)	(4.965.000)	
Jumlah Belanja	76.708.333.450	66.429.409.221	15,47

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 30 Juni 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	20.033.645.000	8.075.219.330	-	8.075.219.330	40,31
5212	Belanja Barang Non Operasional	97.350.940.000	30.514.376.189	-	30.514.376.189	31,34
5218	Belanja Barang Persediaan	1.173.476.000	369.713.475	-	369.713.475	31,51
5221	Belanja Jasa	32.369.089.000	12.690.252.543	-	12.690.252.543	39,20
5231	Belanja Pemeliharaan	8.318.140.000	5.093.941.984	-	5.093.941.984	61,24
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	52.141.686.000	19.967.829.929	3.000.000	19.964.829.929	38,30
		211.386.976.000	76.711.333.450	3.000.000	76.708.333.450	36,29

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat pengembalian pada akun Pengembalian belanja akun (5241) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) sebesar Rp3.000.000,00 yang terdapat di satker BPSDM Hukum dan HAM merupakan pengembalian dari Penginapan Pelatihan TABK (Teknik Auditor Berbantuan Komputer) kerjasama dengan PUSDIKLATWAS BPKP.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp4.004.145.569,
00*

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.004.145.569,00 dan Rp5.860.725.194,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester I Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 31,68% dibandingkan Semester I Tahun Anggaran TA 2022 hal ini dikarenakan realisasi belanja modal pembangunan Politeknik Tangerang akan direalisasikan pada

September 2023, pengadaan peralatan dan mesin yang direncanakan terealisasi pada Semester II Tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.470.843.425	5.202.989.410	(33,29)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	493.630.494	529.435.784	(6,76)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	39.671.650	128.300.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.004.145.569	5.860.725.194	-31,68
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.004.145.569	5.860.725.194	-31,68

*Rincian Realisasi Belanja Barang Modal
per 30 Juni 2023*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.954.081.000	3.470.843.425	-	3.470.843.425	43,64
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.774.107.000	493.630.494	-	493.630.494	0,95
5361	Belanja Modal Lainnya	50.000.000	3.961.650	-	3.961.650	7,92
		59.778.188.000	3.968.435.569	0	3.968.435.569	6,64

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 dan 2022*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp3.470.843.425,
00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.470.843.425,00 mengalami penurunan sebesar 33,29% bila dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.920.411.306,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta penambahan dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.470.843.425	5.202.989.410	-33,29
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	3.470.843.425	5.202.989.410	-33,29
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	3.470.843.425	5.202.989.410	-33,29

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp493.630.494,
00

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp493.630.494,00 dan Rp529.435.784,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409.480.494	207.822.784	97
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	84.150.000	321.613.000	(74)
Jumlah Belanja Kotor	493.630.494	529.435.784	-6,76
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	493.630.494	529.435.784	-6,76

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2023 mengalami penurunan sebesar 6,76% dikarenakan belanja modal pembangunan Politeknik Tangerang masih belum terealisasi pembangunan dan renovasi atas pembangunan Gedung Politeknik.

*Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2023*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.417.435.000	409.480.494	-	409.480.494	1,04
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Belanja	-	-	-	-	-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	12.356.672.000	84.150.000	-	84.150.000	0,68
		51.774.107.000	493.630.494	0	493.630.494	0,95

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp39.671.650,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.671.650,00 dan Rp128.300.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni TA 2023 mengalami penurunan sebesar 69,08% dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja <i>Software</i>	34.714.000	128.300.000	(72,94)
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	4.957.600	-	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	39.671.600	128.300.000	(69,08)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	39.671.600	128.300.000	(69,08)

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain yaitu :

- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp4.957.600,00 berupa pembelian monografi.
- Satker Badiklat Sulut sebesar Rp34.714.000,00 berupa pengembangan aplikasi Sitarsius untuk penyelenggaraan diklat.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp984.988.851,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp984.988.851,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	649.800.000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	335.188.851	-
Jumlah	984.988.851	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan TA 2022*

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.997.034.992,
00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.997.034.992,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.997.034.992	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	2.997.034.992	-

C.4 Uang Muka Belanja Pegawai (*prepayment*)

*Uang Muka
Belanja Pegawai
(prepayment)
Rp186.800,00*

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp186.800,00 dan Rp0,00. Uang Muka Belanja Pegawai (*prepayment*) adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Uang Muka Belanja Pegawai (*prepayment*) terdapat pada satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang merupakan potongan gaji bulan Juli atas kelebihan pembayaran gaji.

C.5 Piutang Bukan Pajak

*Piutang PNBP
Rp221.681,00*

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp221.681,00 dan Rp0,00 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNBP
TA 2023 dan 2022*

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Piutang PNBP	221.681	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	221.681	-
Jumlah	221.681	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar Semester I TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-		-

C.9 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp0,00*

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.034.418.773,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	1.034.418.773
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	1.034.418.773

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.11 Persediaan

*Persediaan
Rp359.921.357,00*

Nilai Persediaan 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp359.921.357,00 dan Rp476.702.771,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan

TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Barang Konsumsi	331.282.907	396.134.911
Barang untuk Pemeliharaan	24.238.450	76.167.860
Amunisi	4.400.000	4.400.000
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	359.921.357	476.702.771

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Non Lancar
Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.15 Tanah

Tanah
Rp1.089.000.068.
000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.089.000.068.000,00. Aset

Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

C.16 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp120.126.127.
883,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.126.127.883,00 dan Rp116.512.418.038,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	Rp 116.512.418.038
Mutasi tambah:	Rp 6.289.842.154
Pembelian	Rp 5.370.820.605
Koreksi Susulan	Rp 136.994.000
Reklasifikasi Masuk	Rp 782.027.549
Mutasi kurang:	Rp 2.676.132.309
Koreksi Catat	Rp 136.994.000
Reklasifikasi Aset	Rp 1.656.446.559
Penghentian aset dari Penggunaan	Rp 882.691.750
Saldo per 30 Juni 2023	Rp 120.126.127.883
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	Rp (80.233.502.205)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	Rp 39.892.625.678

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.332.271.234,00
- Satker Poltekim sebesar Rp99.597.490,00
- Satker Poltekip sebesar Rp163.438.000,00
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp28.000.000,00
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp233.877.350,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp1.432.658.080,00

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM sebesar Rp1.084.861.544,00 berupa Koreksi Pencatatan berupa 1 unit Heat Generating Equipment Lainnya senilai Rp136.994.000,00; Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 1 unit Sedan senilai Rp187.560.000,00 dan 3 unit senilai Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp175.509.000,00. Reklasifikasi keluar Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 6 unit minibus senilai Rp173.624.544,00; Reklasifikasi Keluar Unit Alat Laboratorium berupa 2 unit Portal Press senilai Rp29.920.000,00; Reklasifikasi Keluar berupa 4 unit Serial Scanner/Printer senilai Rp35.592.000,00; Reklasifikasi Keluar berupa 1 unit Kamera Digital senilai Rp38.100.000,00; reklasifikasi keluar Peralatan Komputer berupa 7 unit Serial Printer senilai Rp35.000.000,00; Reklasifikasi Keluar 1 unit Closed Circuit Television (CCTV) senilai Rp199.292.000,00; Reklasifikasi Keluar berupa dan 6 unit Polishing Machine/Mesin Poles senilai Rp73.270.000,00.
- Satker Poltekim sebesar Rp519.622.750,00 berupa penghentian penggunaan Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah).
- Satker Poltekip sebesar Rp163.438.000,00 berupa reklasifikasi keluar Kursi Zeis.

- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp28.000.000,00 berupa reklas peralatan.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp5.791.005,00 berupa reklasifikasi keluar Lemari Penyimpan menjadi Nakas.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp874.419.010,00 berupa reklasifikasi aset menjadi 32 unit A.C Split senilai Rp245.123.600,00; 2 unit Mesin Penghisap Debu senilai Rp10.274.160,00; 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp294.421.250,00; 1 unit *Station Wagon* senilai Rp324.600.000,00.

C.17 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp353.240.892.
754,00*

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp353.240.892.754,00 dan Rp353.165.757.229,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	353.165.757.229
Mutasi tambah:	119.436.000
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	119.436.000
Mutasi kurang:	44.300.475
Reklasifikasi keluar	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	44.300.475
Saldo per 30 Juni 2023	353.240.892.754
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(46.646.674.509)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	306.594.218.245

Terdapat Nilai Mutasi Tambah sebesar Rp119.436.000,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp119.436.000,00 berupa Penyelesaian Pengembangan Nilai Aset (langsung).

Terdapat Nilai Mutasi Kurang Rp44.300.475,00 terdiri dari:

- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp44.300.475,00 koreksi susulan pada Gedung dikarenakan adanya temuan hasil audit inspektorat.

C.18 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp12.359.677.154,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.359.677.154,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	12.359.677.154
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Koreksi pencatatan aset	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2023	12.359.677.154
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(6.587.219.485)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	5.772.457.669

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp3.099.480.647,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.099.480.647,00 dan Rp3.074.558.997,00.

Saldo per 01 Januari 2023	2.972.643.997
Mutasi tambah:	24.921.650
Pembelian	24.921.650
Mutasi kurang:	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2023	2.997.565.647
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2023	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1.460.065.647

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp3.073.558.997.

Mutasi tambah sebesar Rp24.921.650,00 terdapat pada

- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa tengah sebesar Rp4.957.650,00 berupa pembelian 46 monografi.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp19.964.000,00 berupa pembelian 171 monografi.

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp374.194.494,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp374.194.494,00 dan Rp0,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Nilai KDP pada Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp290.044.494,00 dikarenakan sedang adanya proses pembangunan Lapangan Tenis *Outdoor*, Rumah Dinas Tipe C dan Rumah Dinas Tipe D di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Terdapat nilai KDP sebesar Rp84.150.000,00 pada satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan Pembayaran Belanja Modal Termin I (85%) untuk Perencanaan Renovasi Gedung.

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp135.004.896.199,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp135.004.896.199,00 dan Rp122.664.142.634,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	120.126.127.883	80.233.502.205	39.892.625.678
2	Gedung dan Bangunan	353.240.892.754	646.674.509	352.594.218.245
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.359.677.154	6.587.219.485	5.772.457.669
4	Aset Tetap Lainnya	3.099.480.647	1.537.500.000	1.561.980.647
Total		488.826.178.438	89.004.896.199	399.821.282.239

C.22 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp3.157.897.433,00 Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.157.897.433,00 dan Rp3.143.147.433,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 3.157.897.433
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2023		Rp 3.157.897.433

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	Rp 3.143.147.433
Mutasi tambah:	Rp 14.750.000
Pengembangan Apk	Rp 14.750.000
Pembelian	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Reklasifikasi keluar	Rp -
Saldo per 30 Juni 2023	Rp 3.157.897.433
Amortisasi s.d 30 Juni 2023	Rp (2.156.370.991)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	Rp 1.001.526.442

Mutasi tambah sebesar Rp14.750.000,00 terdapat pada Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp14.750.000,00 berupa pengembangan Aplikasi Sitarsius untuk penyelenggara diklat.

C.23 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp5.251.742.286,00 Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp5.251.742.286,00 dan Rp5.188.629.286,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
TA 2023 dan 2022

Jenis Aset	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	5.251.742.286	5.188.629.286
Jumlah Belanja	5.251.742.286	5.188.629.286

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	5.188.629.286
Mutasi tambah:	363.069.000
Reklasifikasi	363.069.000
Mutasi kurang:	299.956.000
Pemindahtanganan BMN Lainnya	140.209.000
Pencatatan penghapusan	103.838.000
Penghapusan BMN	55.909.000
Saldo per 30 Juni 2023	5.251.742.286
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2023	(3.956.006.870)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1.295.735.416

Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp363.069.000,00 terdiri atas :

- Satker BPSDM sebesar Rp363.069.000,00 berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Terdapat Penghentian Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit Sedan senilai Rp. 187.560.000,00 dan 3 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp. 175.509.000,00.

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp299.956.000,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM sebesar Rp159.747.000,00 Penghapusan Terdapat penghapusan 10 dummy Perkakas Kantor Lainnya senilai Rp.13.550.000,00 dan 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp. 90.288.000,00. Pencatatan Barang yang mau dihapuskan. Terdapat barang yang mau dihapuskan berupa 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp55.909.000,00.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp140.209.000,00 atas penjualan / lelang Barang yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp6.112.377.861,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.112.377.861,00 dan Rp5.710.237.777,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	3.157.897.433	2.156.370.991	1.001.526.442
2	ATB Lainnya	-	-	-
	Jumlah	3.157.897.433	2.156.370.991	1.001.526.442
B	Aset Lainnya	5.251.742.286	3.956.006.870	1.295.735.416
	Jumlah	5.251.742.286	3.956.006.870	1.295.735.416
	Total	8.409.639.719	6.112.377.861	2.297.261.858

C.25 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp984.988.851,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp984.988.851,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp9.354.660.417,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.354.660.417,00 dan Rp349.715.146,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa belanja listrik, belanja air dan belanja telepon bulan Desember 2022 yang tagihannya diterima pada Januari 2023. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.095.807.699
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.169.692.726
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	1.095.500.000
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.993.659.992
Total		Rp 9.354.660.417

1. Satker BPSDM sebesar Rp5.960.478.005,00 terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp1.253.756.399,00 merupakan belanja pegawai yang merupakan gaji induk bulan Juli yang sudah terbit SPM di bulan Juni namun belum SP2D.
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp1.242.592.726,00 merupakan belanja kontraktual dan non kontraktual yang belum SP2D.
 - Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp1.095.500.000,00 merupakan belanja modal (seperti laptop, meubel, mesin dll) dengan *outstanding* kontrak.
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp2.368.628.880,00 merupakan belanja barang yang sudah tercatat SPP namun belum proses pembayaran.
2. Satker Poltekim senilai Rp2.435.508.078,00 terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp332.912.809,00
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp1.674.750.000,00
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp427.845.269,00
3. Satker Poltekip senilai Rp510.435.766,00 terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp290.635.232,00
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp75.600.000,00
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp144.200.534,00

4. Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp8.388.400,00 terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp83.388.302,00
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp52.000.000,00
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp24.690.000,00

5. Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp19.658.878,00 terdiri dari:
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp83.693.129,00
 - Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp81.200.000,00
 - Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp28.295.309,00

C.27 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Rp3.667.148.183,00

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.667.148.183,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang yang Belum Diterima Tagihannya terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp539.506.716,00 merupakan belanja yang sudah dicatat dan karwas sudah terinput tapi belum dibayarkan.
- Satker Poltekim senilai Rp2.148.231.500,00 merupakan Pengadaan Pakaian Dinas Taruna.
- Satker Poltekip senilai Rp783.595.357,00 merupakan penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau senilai Rp14.040.000,00 merupakan belanja barang transportasi lokal petugas kelas
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah senilai Rp21.075.810,00 merupakan transaksi bendahara pengeluaran

yang sudah dilakukan penginputan SPBY dan Kuitansinya tetapi belum dilakukan pembuatan SPP dan SPM.

- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara senilai Rp160.698.800,00 berupa GU yang sudah diminta pada Juni tetapi belum dipertanggungjawabkan.

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.520.386,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.29 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.435.824.614.
221,00*

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.435.824.614.221,00 dan Rp1.454.096.342.965,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp595.625.507,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp147.309.507,00 dan Rp432.573.628,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	143.114.930	79.529.678
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	4.194.577	-
425811	Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	353.043.950
Jumlah	Jumlah	147.309.507	432.573.628

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha (4251) sebesar Rp143.114.930,00 terdapat pada:
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp94.409.698,00
 - b. Satker Poltekim sebesar Rp348.167,00
 - c. Satker Poltekip sebesar Rp48.357.065,00
- Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan (4257) berupa Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765) pada satker Poltekip sebesar Rp4.194.577,00 merupakan sisa saldo yang dikembalikan ke negara dari penutupan rekening penampungan Tunjangan Ikatan Dinas Taruna.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp20.919.119.256,
00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.919.119.256,00 dan Rp320.000.962.387,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022
Beban Gaji Pokok PNS	14.499.062.920	14.060.509.456
Beban Pembulatan Gaji PNS	240.102	221.120
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	896.510.290	885.537.584
Beban Tunj. Anak PNS	240.122.702	233.652.662
Beban Tunj. Struktural PNS	365.805.000	591.265.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.732.267.000	1.177.422.000
Beban Tunj. PPh PNS	111.497.424	97.637.025
Beban Tunj. Beras PNS	737.452.860	723.258.540
Beban Uang Makan PNS	1.488.830.000	1.536.733.000
Beban Tunjangan Umum PNS	365.404.958	382.975.000
Beban Uang Lembur	481.926.000	311.751.000
Jumlah	20.919.119.256	20.000.962.387

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp496.959.400,00 dan Rp1.056.817.929,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	496.959.400	990.265.099	50,18
Beban Persediaan bahan baku	-	16.552.100	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	50.000.730	-
Jumlah Beban Persediaan	496.959.400	1.056.817.929	(52,98)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp55.810.856.019,00

Beban Barang dan jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp55.810.856.019,00 dan Rp54.759.386.831,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	8.284.177.936	6.932.852.567	19
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.839.670	1.788.430	3
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	433.650.000	641.490.000	(32)
Beban Barang Operasional Lainnya	361.734.050	496.254.444	(27)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	37.529.200	1.460.882.800	(97)
Beban Bahan	14.884.150.338	2.951.918.368	404
Beban Honor Output Kegiatan	444.810.000	756.070.000	(41)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.635.341.490	20.838.382.925	(11)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	77.099.051	1.993.425.115	(96)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	139.941.830	-	-
Beban Langganan Listrik	1.829.737.495	1.137.833.829	61
Beban Langganan Telepon	7.499.798	5.884.551	27
Beban Langganan Air	33.536.000	3.093.600	984
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.050.583.080	4.399.639.793	(76)
Beban Sewa	4.592.028.320	4.013.216.219	14
Beban Jasa Profesi	4.903.590.000	7.049.364.990	(30)
Beban Jasa Lainnya	88.636.761	164.972.000	(46)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.971.000	1.912.317.200	(100)
Jumlah	55.810.856.019	54.759.386.831	2

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp5.237.068.109,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.237.068.109,00 dan Rp5.636.040.169,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.264.044.046	4.084.341.027	(20)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lain	227.627.900	1.259.984.761	(82)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.676.762.728		-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	68.633.435	291.714.381	(76)
Jumlah	5.237.068.109	5.636.040.169	(7)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp21.837.298.929,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.837.298.929,00 dan Rp6.965.346.867,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	19.483.755.384	6.252.356.494	211,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147.800.000	357.171.397	-58,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.205.743.545	355.818.976	519,91
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid19	0	0	0,00
Jumlah	21.837.298.929	6.965.346.867	213,51

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp35.252.500,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0,00

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp13.665.044.188,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.665.044.188,00 dan Rp12.379.700.139,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.964.666.119	7.019.670.209	13,5
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.774.010.955	4.484.046.851	6,5
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573.834.976	573.834.976	-
Beban Penyusutan Irigasi	9.904.429	9.904.429	-
Beban Penyusutan Jaringan	5.078.125	5.078.125	-
Beban Amortisasi Software	293.122.570	243.972.885	20,1
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	44.427.014	43.192.664	2,9
Jumlah	13.665.044.188	12.379.700.139	10,4

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp547,393,767,00*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp547,393,767,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94.897.664	157.669.133	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.477.500	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	453.973.603	1.793.245.691	-74,68
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	547.393.767	1.950.914.824	-71,94

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian*

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp453.973.603,00 terdapat pada :

1. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp556.320,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) atas pengembalian tunjangan umum dan tunjangan pembulatan karena ada pegawai yang menduduki jabatan fungsional.
2. Satker Poltekim sebesar Rp384.628.500,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) berupa sisa kontrak tahun lalu.
3. Satker Poltekip sebesar Rp152,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL berupa pengembalian pembulatan gaji PNS.
4. Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp44.300.475,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL terdiri dari Rp14.861.791,34 atas pembangunan Gedung Olahraga dan Jalan Lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hasil temuan audit BPK atas pembangunan gedung olahraga dan jalan lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp29.438.683,31.
5. Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp24.488.156,00 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp186.804,00 atas penerimaan kelebihan pembayaran gaji a.n Wahyuni Sasto dan pembulatan gaji a.n Ju Lotje Olga dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp24.301.352,00 berupa setoran temuan BPK.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

*Pos-Pos Luar
Biasa
Rp0,00*

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.454.096.342.965,00,00

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.454.096.342.965,00 dan Rp1.444.031.040.202,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
Rp117.271.642.627,00

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah defisit sebesar Rp117.271.642.627,00 dan Rp98.450.018.370,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi Reklasifikasi Aset
Rp0,00

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi
Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp59.748.814,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp59.748.814,00 dan (Rp1.508.795.466,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah jalan khusus kompleks, dengan rincian sebagai berikut:

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp98.940.165.
069,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.940.165.069,00 dan Rp85.887.271.276,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(595.625.507)
Ditagihkan ke Entitas Lain	99.535.790.576
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	98.940.165.069

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL
(Rp595.625.507,
00)/
Rp99.535.790.
576,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar (Rp595.625.507,00) sedangkan DKEL sebesar Rp99.535.790.576,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp0,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp99.500.000,00 berupa 1 unit Golfcar.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp0,00

Ekuitas Akhir
Rp1.435.824.614.
221,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.435.824.614.221,00 dan Rp1,429,957,573,642.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp11.199.900,00. Ketidaksesuaian kode akun yang digunakan karena tidak terdapat anggaran belanja atas aset ekstrakomtabel pada DIPA dan tidak dapat dilakukan koreksi SPM parsial. Terhadap pengadaan atas barang ekstrakomtabel yang akan dilaksanakan pada Semester II sedang dilakukan proses revisi anggaran untuk memunculkan akun Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel (521252).
 - a. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp11.199.900,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.376.400,00 atas pembelian Oksimeter Omron.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.798.200,00 atas pembelian Termometer Infrared Yuwel.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.642.800,00 atas pembelian Kursi Lipat portabel Folding Chair Soleil.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp2.830.500,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Easytouch.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp3.552.000,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Accupro.
 - b. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp58.741.930,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp646.575,00 atas pembelian kursi besi.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp921.665,00 atas pembelian tabung pemadam api.
2. Terdapat Saldo Akun Tidak Normal pada satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara berupa Uang Muka Belanja Pegawai (*prepayment*) (114211) yang merupakan potongan gaji bulan Juli atas kelebihan pembayaran gaji.

3. Temuan Audit Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM atas pembangunan Gedung Olahraga dan Jalan Lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp14.861.791,34 dan Hasil Temuan Audit BPK atas pembangunan Gedung Olah Raga dan Jalan Lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp29.438.683,31.
 4. Koreksi susulan pada satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah berupa Gedung sebesar Rp44.300.475,00 dikarenakan adanya temuan hasil audit Inspektorat Jenderal dan BPK sebesar Rp43.392.447.415,00.
 5. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) pada satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara atas temuan BPK dan Itjen Rp24.301.352,00. Untuk temuan BPK senilai Rp14.730.000,00 atas CV. Multi Perkasa berupa kekurangan volume lanjutan pembangunan Asrama dan Gedung serbaguna Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan temuan Itjen senilai Rp1.576.577,00 atas PT. Mita Mantari berupa pengembalian kelebihan pembayaran ongkos kirim pengadaan kursi besi metal pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara TA 2022, senilai Rp7.994.775,00 atas PT. Datascrip berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran ongkos kirim pengadaan meja kelas pada TA 2022.
3. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m2 akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini telah selesai dilaksanakan pembongkaran bangunan eksisting (rumah negara) yang akan dijadikan objek pembangunan bangunan pengganti berupa Rumah Negara dengan rincian :
- a. Rumah Negara Tipe A sebanyak 1 unit
 - b. Rumah Negara Tipe B sebanyak 7 unit
 - c. Rumah Negara Tipe C sebanyak 9 unit
 - d. Flat seluas 471 meter persegi.
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan seluas 2.385 meter persegi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
 - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
 - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
 - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
 - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

- II. Terdapat realisasi belanja anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 yang terdiri dari :
 - Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) sebesar Rp36.779.200,00 pada satker Poltekop sebesar Rp29.992.000,00, satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp6.787.000,00.
 - Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) sebesar Rp77.099.051,00 pada satker satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp42.228.900, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp23.154.151,00, satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp11.716.000,00.
 - Realisasi Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) sebesar Rp991.500,00 pada satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp494.000,00; satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp497.500,00 .
 - Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp4.971.000,00 pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp325.000,00, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp4.646.000,00.

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	984,988,851	0	984,988,851	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,997,034,992	0	2,997,034,992	0.00
Uang Muka Belanja (prepayment)	(186,800)	0	(186,800)	0.00
Piutang Bukan Pajak	221,681	0	221,681	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	221,681	0	221,681	0.00
Persediaan	359,921,357	476,702,771	(116,781,414)	(24.50)
JUMLAH ASET LANCAR	4,341,980,081	476,702,771	3,865,277,310	810.84
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	120,126,127,883	116,512,418,038	3,613,709,845	3.10
Gedung dan Bangunan	353,240,892,754	353,165,757,229	75,135,525	0.02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,359,677,154	12,359,677,154	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,099,480,647	3,074,558,997	24,921,650	0.81
Konstruksi Dalam Pengerjaan	374,194,494	0	374,194,494	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(135,004,896,199)	(122,664,142,634)	(12,340,753,565)	10.06
JUMLAH ASET TETAP	1,443,195,544,733	1,451,448,336,784	(8,252,792,051)	(0.57)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,157,897,433	3,143,147,433	14,750,000	0.47
Aset Lain-lain	5,251,742,286	5,188,629,286	63,113,000	1.22
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(6,112,377,861)	(5,710,237,777)	(402,140,084)	7.04
JUMLAH ASET LAINNYA	2,297,261,858	2,621,538,942	(324,277,084)	(12.37)
JUMLAH ASET	1,449,834,786,672	1,454,546,578,497	(4,711,791,825)	(0.32)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,354,660,417	349,715,146	9,004,945,271	2,574.94
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,667,148,183	0	3,667,148,183	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	100,520,386	(100,520,386)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	984,988,851	0	984,988,851	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3,375,000	0	3,375,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,010,172,451	450,235,532	13,559,936,919	3,011.74
JUMLAH KEWAJIBAN	14,010,172,451	450,235,532	13,559,936,919	3,011.74
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,435,824,614,221	1,454,096,342,965	(18,271,728,744)	(1.26)
JUMLAH EKUITAS	1,435,824,614,221	1,454,096,342,965	(18,271,728,744)	(1.26)
JUMLAH EKUITAS	1,435,824,614,221	1,454,096,342,965	(18,271,728,744)	(1.26)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,449,834,786,672	1,454,546,578,497	(4,711,791,825)	(0.32)

Keterangan :

BELUM FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 22/07/23 10:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	304,694,164,000	99,535,790,576	205,158,373,424	33	284,182,140,000	88,196,197,046	195,985,942,954	31
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:50 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	147,309,507	432,573,628	(285,264,121)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	147,309,507	432,573,628	(285,264,121)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	147,309,507	432,573,628	(285,264,121)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	20,919,119,256	20,000,962,387	918,156,869	-
Beban Persediaan	496,959,400	1,056,817,929	(559,858,529)	-
Beban Barang dan Jasa	55,810,856,019	54,759,386,831	1,051,469,188	-
Beban Pemeliharaan	5,237,068,109	5,636,040,169	(398,972,060)	-
Beban Perjalanan Dinas	21,837,298,929	6,965,346,867	14,871,952,062	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	35,252,500	(35,252,500)	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:50 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13,665,044,188	12,379,700,139	1,285,344,049	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	117,966,345,901	100,833,506,822	17,132,839,079	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(117,819,036,394)	(100,400,933,194)	(17,418,103,200)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	93,420,164	157,669,133	(64,248,969)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94,897,664	157,669,133	(62,771,469)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,477,500	0	1,477,500	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	453,973,603	1,793,245,691	(1,339,272,088)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	453,973,603	1,793,245,691	(1,339,272,088)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	547,393,767	1,950,914,824	(1,403,521,057)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(117,271,642,627)	(98,450,018,370)	(18,821,624,257)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(117,271,642,627)	(98,450,018,370)	(18,821,624,257)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:50 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(117,271,642,627)	(98,450,018,370)	(18,821,624,257)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	59,748,814	(1,510,719,466)	1,570,468,280	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(1,924,000)	1,924,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	59,748,814	(1,508,795,466)	1,568,544,280	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	98,940,165,069	85,887,271,276	13,052,893,793	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,271,728,744)	(14,073,466,560)	(4,198,262,184)	-
EKUITAS AKHIR	1,435,824,614,221	1,429,957,573,642	5,867,040,579	-

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	649,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	335,188,851	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,997,034,992	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	0	186,800
0.0	115212	Piutang Lainnya	221,681	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	331,282,907	0
0.0	117112	Amunisi	4,400,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,238,450	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	120,126,127,883	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	353,240,892,754	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,099,480,647	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	374,194,494	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	80,233,502,205
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	46,646,674,509
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5,587,425,037
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	118,853,148
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	880,941,300
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	162151	Software	3,157,897,433	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5,251,742,286	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,956,006,870
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,156,370,991
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,095,807,699
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	3,169,692,726
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	1,095,500,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,993,659,992
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,667,148,183
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	984,988,851
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	3,375,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	99,535,790,576
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	595,625,507	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,454,096,342,965
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	59,748,814
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	143,114,930
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	743,276
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,601,827
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	14,499,062,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	240,102	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	896,510,290	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	240,122,702	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	365,805,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,732,267,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	111,497,424	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	737,452,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,488,830,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	365,404,958	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	481,926,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,284,177,936	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,839,670	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	433,650,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	361,734,050	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	37,529,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	14,884,150,338	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	444,810,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	18,635,341,490	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	77,099,051	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	139,941,830	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,829,737,495	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,499,798	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	33,536,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,050,583,080	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,592,028,320	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,903,590,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	88,636,761	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,971,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,264,044,046	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	227,627,900	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,676,762,728	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:52 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	19,483,755,384	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	147,800,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,205,743,545	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,964,666,119	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,774,010,955	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	573,834,976	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,904,429	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,078,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	293,122,570	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	44,427,014	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	496,959,400	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	68,633,435	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,477,500	0
JUMLAH			1,709,515,696,440	1,709,515,696,440

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	99,535,790,576
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	595,625,507	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	42,559,663
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	743,276
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,601,827
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,886,400,240	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	218,182	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	797,041,570	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	213,392,740	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	325,210,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,544,200,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	106,597,456	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	655,183,740	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,488,830,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	325,795,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	481,926,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,241,216,410	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,839,670	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	433,650,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	361,734,050	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,779,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	13,685,665,318	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	374,810,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,306,801,820	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	77,099,051	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	70,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	310,959,573	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	57,762,402	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	991,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,170,148,677	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	8,413,862	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	34,913,800	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,025,307,123	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,581,696,320	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI

: (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 22/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 22/07/23 10:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,778,040,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	86,761,761	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,971,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,263,704,046	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,822,360	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	227,627,900	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,595,787,678	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	17,896,994,384	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144,050,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,926,785,545	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,470,843,425	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	409,480,494	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	84,150,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	39,671,650	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,329
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,480,042
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	3,000,000
JUMLAH			100,135,899,454	100,135,899,454

Keterangan :

BELUM FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/23 10:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,826,728,000	20,097,492,000	12,886,400,240	0	12,886,400,240	64.12	7,211,091,760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	403,000	408,000	218,182	3,329	214,853	52.66	193,147
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,545,975,000	1,568,622,000	797,041,570	0	797,041,570	50.81	771,580,430
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	347,034,000	355,733,000	213,392,740	0	213,392,740	59.99	142,340,260
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,015,150,000	1,014,150,000	325,210,000	0	325,210,000	32.07	688,940,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,704,515,000	1,729,803,000	1,544,200,000	0	1,544,200,000	89.27	185,603,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	147,539,000	149,237,000	106,597,456	0	106,597,456	71.43	42,639,544
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,205,838,000	1,224,886,000	655,183,740	0	655,183,740	53.49	569,702,260
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,986,161,000	4,996,817,000	1,488,830,000	0	1,488,830,000	29.8	3,507,987,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	792,285,000	799,135,000	325,795,000	1,480,042	324,314,958	40.58	474,820,042
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	31,571,628,000	31,936,283,000	18,342,868,928	1,483,371	18,341,385,557	57.44	13,594,897,443
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,545,301,000	1,592,717,000	481,926,000	0	481,926,000	30.26	1,110,791,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,545,301,000	1,592,717,000	481,926,000	0	481,926,000	30.26	1,110,791,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	33,116,929,000	33,529,000,000	18,824,794,928	1,483,371	18,823,311,557	56.14	14705688443
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,300,494,000	17,608,078,000	7,241,216,410	0	7,241,216,410	41.12	10,366,861,590
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38,000,000	27,650,000	1,839,670	0	1,839,670	6.65	25,810,330
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,010,390,000	1,075,670,000	433,650,000	0	433,650,000	40.31	642,020,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	655,250,000	1,033,447,000	361,734,050	0	361,734,050	35	671,712,950
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,135,267,000	288,800,000	36,779,200	0	36,779,200	12.74	252,020,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	20,139,401,000	20,033,645,000	8,075,219,330	0	8,075,219,330	40.31	11,958,425,670
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	37,441,961,000	35,326,256,000	13,685,665,318	0	13,685,665,318	38.74	21,640,590,682
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,437,330,000	1,680,090,000	374,810,000	0	374,810,000	22.31	1,305,280,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,359,553,000	60,013,064,000	16,306,801,820	0	16,306,801,820	27.17	43,706,262,180
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,297,050,000	261,530,000	77,099,051	0	77,099,051	29.48	184,430,949
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	71,535,894,000	97,350,940,000	30,514,376,189	0	30,514,376,189	31.34	66,836,563,811
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	360,588,000	904,313,000	310,959,573	0	310,959,573	34.39	593,353,427
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	225,500,000	225,500,000	57,762,402	0	57,762,402	25.62	167,737,598
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	43,663,000	43,663,000	991,500	0	991,500	2.27	42,671,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/23 10:53 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	629,751,000	1,173,476,000	369,713,475	0	369,713,475	31.51	803,762,525
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,556,000,000	4,872,000,000	2,170,148,677	0	2,170,148,677	44.54	2,701,851,323
522112	Belanja Langganan Telepon	42,720,000	15,120,000	8,413,862	0	8,413,862	55.65	6,706,138
522113	Belanja Langganan Air	88,200,000	215,958,000	34,913,800	0	34,913,800	16.17	181,044,200
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,972,400,000	5,155,791,000	1,025,307,123	0	1,025,307,123	19.89	4,130,483,877
522141	Belanja Sewa	5,691,259,000	6,290,510,000	4,581,696,320	0	4,581,696,320	72.84	1,708,813,680
522151	Belanja Jasa Profesi	17,343,750,000	15,405,730,000	4,778,040,000	0	4,778,040,000	31.01	10,627,690,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	119,150,000	207,550,000	86,761,761	0	86,761,761	41.8	120,788,239
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,583,407,000	206,430,000	4,971,000	0	4,971,000	2.41	201,459,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	32,396,886,000	32,369,089,000	12,690,252,543	0	12,690,252,543	39.2	19,678,836,457
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,593,330,000	4,247,281,000	3,263,704,046	0	3,263,704,046	76.84	983,576,954
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	26,425,000	30,000,000	6,822,360	0	6,822,360	22.74	23,177,640
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	768,709,000	560,000,000	227,627,900	0	227,627,900	40.65	332,372,100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,943,000,000	3,480,859,000	1,595,787,678	0	1,595,787,678	45.84	1,885,071,322
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	6,331,464,000	8,318,140,000	5,093,941,984	0	5,093,941,984	61.24	3,224,198,016
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	34,505,505,000	46,429,543,000	17,896,994,384	3,000,000	17,893,994,384	38.54	28,535,548,616
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,726,080,000	385,200,000	144,050,000	0	144,050,000	37.4	241,150,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,624,216,000	5,326,943,000	1,926,785,545	0	1,926,785,545	36.17	3,400,157,455
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	38,855,801,000	52,141,686,000	19,967,829,929	3,000,000	19,964,829,929	38.3	32,176,856,071
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	169,889,197,000	211,386,976,000	76,711,333,450	3,000,000	76,708,333,450	36.29	134678642550
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,402,441,000	7,954,081,000	3,470,843,425	0	3,470,843,425	43.64	4,483,237,575
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	6,402,441,000	7,954,081,000	3,470,843,425	0	3,470,843,425	43.64	4,483,237,575
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,417,435,000	39,417,435,000	409,480,494	0	409,480,494	1.04	39,007,954,506
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,635,200,000	12,356,672,000	84,150,000	0	84,150,000	0.68	12,272,522,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	46,052,635,000	51,774,107,000	493,630,494	0	493,630,494	0.95	51,280,476,506
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	15,000,000	50,000,000	39,671,650	0	39,671,650	79.34	10,328,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	15,000,000	50,000,000	39,671,650	0	39,671,650	79.34	10,328,350
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	52,470,076,000	59,778,188,000	4,004,145,569	0	4,004,145,569	6.7	55774042431

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/23 10:53 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	255,476,202,000	304,694,164,000	99,540,273,947	4,483,371	99,535,790,576	32.67	205,158,373,424

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/23 10:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664	0	94,897,664	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91,039,000	42,559,663	0	42,559,663	46.75
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	91,039,000	137,457,327	0	137,457,327	150.99
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577	0	4,194,577	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	4,194,577	0	4,194,577	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	743,276	0	743,276	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500	0	384,628,500	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,601,827	0	68,601,827	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	453,973,603	0	453,973,603	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,078,539,000	595,625,507	0	595,625,507	55.23
	JUMLAH PENDAPATAN	1,078,539,000	595,625,507	0	595,625,507	55.23

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/23 10:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,135,267,000	288,800,000	36,779,200	0	36,779,200	12.74	252,020,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,135,267,000	288,800,000	36,779,200	0	36,779,200	12.74	252,020,800
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,297,050,000	261,530,000	77,099,051	0	77,099,051	29.48	184,430,949
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,297,050,000	261,530,000	77,099,051	0	77,099,051	29.48	184,430,949
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	43,663,000	43,663,000	991,500	0	991,500	2.27	42,671,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,663,000	43,663,000	991,500	0	991,500	2.27	42,671,500
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,583,407,000	206,430,000	4,971,000	0	4,971,000	2.41	201,459,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,583,407,000	206,430,000	4,971,000	0	4,971,000	2.41	201,459,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,059,387,000	800,423,000	119,840,751	0	119,840,751	14.97	680582249
	JUMLAH BELANJA	4,059,387,000	800,423,000	119,840,751	0	119,840,751	14.97	680,582,249